

Pemerintah Akan Lelang Gula Rafinasi Mulai Oktober

Sistem itu diyakini akan mengatasi kebocoran gula rafinasi ke pasar.

Retno Sulistyowati
retno_s@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Perdagangan akan memulai sistem lelang gula rafinasi pada 1 Oktober mendatang. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimistis ihwal skema itu. Dengan demikian, akan ada perlakuan yang sama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta besar, dalam mendapatkan bahan baku, yaitu gula. "Mereka selama ini beli di pasar, dan patut diduga mereka belinya dari (gula rafinasi) yang bocor," kata Enggartiasto, di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Kebijakan melelang gula rafinasi didasarkan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas. Selama ini, pelaku usaha yang membutuhkan gula rafinasi meneken kontrak impor

untuk mendatangkan komoditas tersebut. Penggunaan gula rafinasi adalah industri makanan dan minuman di Indonesia.

Ia menyebutkan, industri kecil dan menengah akan mendapat porsi 20 persen dari gula rafinasi yang dilelang nanti. Namun persentase itu akan disesuaikan dengan perkembangan ke depan. "Pada waktu buka awal (lelang), jam-jam tertentu akan layani IKM (industri kecil-menengah) dulu." Tahun ini, volume impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri direncanakan 3,2 juta ton.

Enggartiasto yakin sistem lelang ini akan mengatasi persoalan bocornya gula rafinasi impor ke pasar. Ia memperkirakan sekitar 200-300 ribu ton gula rafinasi bocor ke pasar, setiap tahun.

Menurut Enggartiasto, saat ini ada 300 *buyer* dan 11 *seller* yang terdaftar sebagai pelaku di pasar lelang tersebut. Program

sosialisasi tengah gencar dilakukan oleh Pusat Komoditas Jakarta (PKJ), yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara lelang.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, mengatakan, di dalam pasar lelang gula ini sudah ditetapkan harga gula maksimumnya adalah Rp 10 ribu per kilogram. Bachrul menyampaikan bahwa aturan ini sudah sangat ditunggu oleh pelaku IKM.

Bachrul mengungkapkan, selama ini pelaku IKM membeli bahan baku gula di secara ilegal karena mereka kesulitan mendapatkan bahan baku. Padahal pelaku IKM ini sangat ingin meningkatkan kualitasnya.

Pemerintah memberi pengecualian kepada pelaku usaha yang telah mengantongi kontrak impor gula rafinasi, ketika sistem lelang berlaku pada 1 Oktober mendatang. Mereka wajib melapor ke Kementerian Perdagangan ihwal kondisi stok di gudang. "Tolong dilaporkan. Yang perlu

kami tahu datanya benar," kata Enggartiasto.

Enggar mengatakan, bila berada di posisi pengusaha, ia akan memilih tak memperpanjang kontrak impor. Sebab, bahan baku bisa didapatkan lebih murah di pasar lelang komoditas.

Ia menepis anggapan bahwa lelang ini akan menyebabkan pelaku usaha dibebani biaya-biaya tertentu. Ia memastikan harga Rp 10 ribu per kilogram itu sudah final tanpa ada beban biaya apa pun. "Tidak ada biaya lagi."

Bachrul menambahkan, pemerintah memberi waktu transisi kebijakan ini, terutama bagi para pelaku usaha yang masih memegang kontrak impor. Kontrak-kontrak yang masih ada akan dievaluasi, nanti, setelah sistem lelang sudah baik ke depannya.

Adapun harga maksimum gula rafinasi, Bachrul menyampaikan, yakni Rp 10 ribu per kilogram, akan dipertahankan sampai akhir tahun ini. Setelah akhir tahun, pemerintah akan mengevaluasi harga.

● DIKO OKTARA